

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan Penulis dalam Bab 1 mengenai Pendahuluan, maka sampailah Penulis pada pemaparan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang Penulis lakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penegakkan hak-hak berdaulat di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Laut Tiongkok Selatan dapat dijatuhkan kepada negara Indonesia, apabila memang menilik berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982 sebagai hukum internasional yang berlaku untuk mengatur kepemilikan wilayah maritim suatu negara. Apabila dikaitkan dengan tindakan penempatan Kapal Negara yang dilakukan oleh Negara Tiongkok di sekitar Laut Natuna Utara, maka dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara Tiongkok tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam UNCLOS 1982. Tindakan tersebut bukanlah termasuk ke dalam kriteria *freedom of navigation* yang merupakan pengecualian terhadap tindakan yang dapat dilakukan oleh negara asing di dalam wilayah ZEE suatu negara, yang mana dalam hal ini adalah negara Indonesia.
2. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh negara Indonesia dapat dikatakan masih bersifat responsif sedangkan untuk menanggapi penempatan Kapal Negara yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut, diperlukan sikap pro aktif oleh Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak berdaulatnya di sekitar wilayah Laut Natuna Utara. Menggencarkan Patroli oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut secara berkala di sekitar wilayah perairan Laut Natuna Utara, sembari meningkatkan keberadaan dari negara Indonesia di sekitar wilayah Laut Natuna Utara melalui tindakan eksplorasi Sumber Daya Alam di wilayah Laut Natuna Utara ataupun juga melakukan penelitian bawah laut, guna melaksanakan hak berdaulat negara Indonesia serta mempertegas posisi Indonesia di Laut Natuna Utara. Langkah pengajuan sengketa kepada Pengadilan Internasional menjadi opsi terakhir yang dapat diambil oleh negara Indonesia apabila memang sikap ataupun

tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia diacuhkan dan dihiraukan oleh negara Tiongkok.

5.2 Saran

1. Indonesia perlu untuk membuat suatu kebijakan yang berlaku secara internal yang secara khusus membahas hal berkaitan dengan penegasan Hak Berdaulat Indonesia atas wilayah Laut Natuna Utara, hal ini dilakukan guna mengantisipasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Tiongkok menjadi lebih melebar dari apa yang terlihat sekarang.
2. Indonesia bersama dengan negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan, secara pro aktif perlu untuk memperjuangkan hak-haknya atas wilayah maritim di sekitar Laut Tiongkok Selatan, agar pada nantinya Tiongkok dapat melunak ataupun menarik klaimnya atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dialog dan juga diskusi terbuka dengan seluruh pihak dapat menjadi jalan tengah mewujudkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL & BUKU:

- Chadafi, M.I.2021. *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Chomariyah. (2017). Prinsip *Equitable* dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016. Seminar Nasional Kelautan XII: Universitas Hang Tuah, A-75.
- Dewi, R., Luhulima, CPF.2015. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan*. Yogyakarta: P2P-LIPI
- Dundua, N. 2006-2007. Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States. The Nippon Foundation Fellow, 3.
- EMODNet. 2016. National Coastlines and Baselines – data Set Collection for European Countries. *EMODNet Phase III, 4*
- International Hydrographic Organization. 1953. *Limits of Oceans and Seas*. Monte Carlo: International Hydrographic Organization
- Ryacudu, R. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pertahanan Republik Indonesia
- Soekanto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, J. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tirtamulia, T. 2011. *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Bandung: PT. Brilian Internasional.
- Wahyono. 2007. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Yayasan Penerbit Nusantara
- Walker, G.K. 2011. Definitions for The Law of The Sea: Terms Not Defined by the 1982 Convention. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers

JURNAL:

- Agusman, D.D., Fatihah, C.Y.N. (2020). Celebrating The 25th Anniversary of UNCLOS Legal Perspective: The Natuna Case. *Indonesian Journal of International Law*, 17, 547.
- Anis, G.M.S. Implementasi Hukum Diplomatik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961. *Lex Et Societatis*, Vol V, 2, 104
- Ardila, R., Putra, A.K. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim China atas Laut Natuna Utara), *Studi Kasus*, 366
- Fahrudin, A., Solihin, A. Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Modul 1: Legalitas Kelautan dan Perikanan*, 1.9, 1.11
- Fahmy, W. (2018). Equitable Principles from the Perspective of International Law of the Sea. *Economics, Law and Policy*, Vol 1, 1, 53.
- Fook, L.L., Hop, H.H. (2018). Vietnam's Responses to China's Maritime Assertiveness in the South China Sea. *ISEAS, Issue 2018(50)*, 3
- Gao, Z., Jia, B.B. The Nine Dash Line in The South China Sea: History, Status, and Implications. *The American Journal of International Law*, Vol 107(98), 100
- Gaunce, J. (2017). The General Duty of "Due Regard" under the United Nations Convention on The Law of The Sea. *Thesis*. Kanada: Universitas Calgary, 24
- Junef, M. (2020). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 222
- Li, J., Amer, R. Freedom of Navigation and Peaceful Uses of the Seas: UNCLOS, Chinese Perspectives and Personal Thoughts, 142.

- Lothian, S. The Historical Development of The Law of The Sea: Part 2. *Presentation Slide: University of Wollongong Ancors (Australian National Centre for Ocean Resources and Security)*, Slide 2, Slide 8
- Ma'ruf, F., Legionosuko, T., Risman, H. (2020). The Rationality of Indonesia Free Active Politics Facing Chine Aggressiveness in the Claims of the North Natuna Sea. *Technium Social Science Journal*, 8, 583
- Maksum, A. (2017). Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. *Jurnal Sospol*, 3 (1), 4-5.
- Noor, A.V. (2018). Pengaturan Keamanan Maritim (*Maritime Security*) dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Kawasan Asia Tenggara. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 32.
- Office of the Staff Judge Advocate. (2021). U.S. Protests China's Maritime Claims in the South China Sea. *International Law Study*, Vol 97, 90.
- Pardo, A. (1984). The Law of The Sea: Its Past and Its Future. *Oregon Law Review*, Vol 63,1, 7.
- Pattiasina, Y., Wattimena, J.A.Y., Peilow, J.S.F. Putusan Permanen Court of Arbitration Dalam Sengketa Antara PhilipinaChina Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan. *Tatohi Jurnal Hukum*, Vol 2(1), 18.
- Purwaka, T.H. (2014). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26(6), 6
- Putro, D.S. (2014). Studi Karakteristik Respon Struktur Akibat Eksitasi Gelombang pada Semi Submersible Drilling Rig dengan Dua Kolom Miring dan Ponton Persegi Empat. *Tugas Akhir*: Institut Teknologi Sepuluh November, 1
- Rahim, A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Arbitrase Internasional (*Arbital Tribunal*) tentang Sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina. *Skripsi*. Pontianak: Universitas Tanjungpura, 201
- Ramon, A.A.V. (2017). The Legality of Foreign Peacetime Military Activities in The Exlusive Economic Zone of Another State. *Veritas Et Justitia*, Vol 3, 2, 345.
- Rehatta, V.J.B. Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Sasi*, Vol 20(1), 66
- Riyadi, Rio A., Sari, D.A.A. (2019). Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis* 5(1), 18.
- Rosen, M.E. (2014). Phillipine Claim in The South China Sea: A Legal Analysis. *CNA*, 39
- Sambogo, A. (2018). Penamaan Laut Natuna Utara oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurist Diction*, 1(2), November 2018.
- Simajuntak, M. Menolak Klaim Historis China "Nine Dash Line" dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan serta Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10(2), 152.
- Tasya, A.H., Rahmasari, N.S.N., Alfarizhi, M., Michael, T. (2021). Indonesia or China: Which Country Has the Rightful Claim Over North Natuna Sea. *Technium Social Science Journal*, 21, 516.
- Utomo, H. (2017). Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal (*Legally Response in Ship Accident*). *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 14(1), 59
- Winarwati, I. (2014). Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9 (1), 57
- Zhonghai, Z. (2006). On The Connotation and Practice of The Right of Hot Pursuit. *China Ocean Law Review*, Vol 2006(1), 557.

INSTRUMEN HUKUM:

- Biden, J. (2022). National Security Strategy. White House: Washington, 37
- ITLOS. (2016). A Guide to Proceedings Before The International Tribunal Law Of The Sea. Hamburg: ITLOS, *Foreword* and *Annex 1*
- ICJ. 2009. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). Den Haag: ICJ
- United Nations. (1945). Charter of The United Nations. San Fransisco: United Nations.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of The Sea*. Montego Bay: United Nations.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Permanent Court of Arbitration. 2016. AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA - between - THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES - and - THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. Hague: Permanent Court of Arbitration, 473.
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi dan Geospasial

WEBSITE:

- Admin. (2021, 12 November). *Nervous Energy: China Targets New Indonesian, Malaysian Drilling*. Diakses melalui <https://amti.csis.org/nervous-energy-china-targets-new-indonesian-malaysian-drilling/>
- Admin. (2022, 1 Maret). *What Lies Beneath: Chinese Surveys in The South China Sea*. Diakses 2022 melalui <https://amti.csis.org/what-lies-beneath-chinese-surveys-in-the-south-china-sea/>
- Admin. (2022). Hai Yang Dizhi Shi Hao. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9795751>
- Arsana, A. (2020, 3 Januari). Seteru dengan Tiongkok di Laut Natuna. Diakses melalui <https://madeandi.com/2020/01/03/seteru-dengan-tiongkok-di-laut-natuna/>
- ASEAN States and China. (2002). Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. diakses 7 Desember 2022 melalui <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>,
- Azanella, L.A. (2021, 3 Desember). *Mengenal Natuna, Letak dan Potensi Kekayaan Alamnya*. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/03/183000865/mengenal-natuna-letak-dan-potensi-kekayaan-alamnya?page=all#page3>
- Badan Informasi Geospasial. (2017). *Peta Laut Natuna Utara*. Diakses melalui https://big.go.id/assets/download/2017/NKRI-2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_03102017.jpg
- BBC. (2020, 14 Juli). South China Sea: What's China's Plan for its 'Great Wall of Sand?'. diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-53344449>
- Bisnis News. (2021, 4 Desember). Kepulauan Natuna dalam Perspektif Maritim Sudah Clear Milik Indonesia dan Diakui PBB. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://bisnisnews.id/detail/berita/kepulauan-natuna-dalam-perspektif-maritim-sudah-clear-milik-indonesia-dan-diakui-pbb>
- China Nanhai. (2017 ,15 Maret). Brief Introduction to Nanhai Zhudao (the Nanhai Islands). Diakses 2 Desember 2022 melalui http://en.thesouthchinasea.org.cn/2017-03/15/c_71515.htm

- Blinken, A.J. (2022, 12 Oktober). Release of The President's National Security Strategy. diakses 4 Desember 2022 melalui <https://www.state.gov/release-of-the-presidents-national-security-strategy/>
- CNN. (2021, 18 November). 'Hantu' Kapal Riset China di Laut Natuna Utara. Diakses 4 Desember 2022 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104195746-20-716820/hantu-kapal-ri-set-china-di-laut-natuna-utara/3>
- Dutton, P.A. (2020, 27 Juli). Vietnam Threatens China with Litigation over The South China Sea. Diakses 4 Desember 2022 melalui <https://www.lawfareblog.com/vietnam-threatens-china-litigation-over-south-china-sea>
- Fadli. (2019, 31 Desember). Indonesia Issues Protest to Beijing over Chinese Vessel Trespassing in Natuna. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-protest-to-beijing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html>
- Fahmi. (2021, 9 Oktober). Kapal Survey China Mondar-Mandir di Laut Indonesia, Diduga ingin Lakukan Ini. Diakses melalui <https://www.beritatrans.com/artikel/215978/Kapal-Survei-China-Mondar-mandir-di-Laut-Indonesia-Diduga-Ingin-Lakukan-Ini/#:~:text=Haiyang%20Dizhi%2010%20merupakan%20kapal,dan%20gambar%20dari%20bawah%20laut>
- Feng, J. (2022, 14 September). Phillipines Protests China's Moves in South China Sea Dozens of Times. Diakses 4 Desember 2022 melalui <https://www.newsweek.com/philippines-ferdinand-marcos-jr-protest-china-action-south-china-sea-1742879>
- Gupta, S., Geraci, M. (2020). China's Claims in the South China Sea. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://storymaps.arcgis.com/stories/f41484de9d4144c59b22540cb94b150a>
- Hakim, C. (2013, 5 April). The South China Sea, pivots and Indonesia. diakses 10 Desember 2022 melalui <http://www.chappyhakim.com/south-china-sea/>
- Hakim, I. A. (2021, 28 Desember). China Larang Indonesia Ambil SDA, Pemerintah Bungkam tapi Perkuat Pertahanan. Diakses 17 Mei 2022 melalui <https://www.kompas.tv/article/246172/china-larang-indonesia-ambil-sda-di-laut-china-selatan-pemerintah-bungkam-tapi-perkuat-pertahanan?page=all#:~:text=YOGYAKARTA%2C%20KOMPAS.TV%20%2D%20Pemerintah,operasi%20pengeboran%20di%20perairan%20tersebut>
- Halim, D. (2020, 5 Januari). Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine Dash Line Dinilai Tak Berdasar. Diakses 30 Mei 2022 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/05/19321561/jadi-dasar-china-klaim-natuna-nine-dash-line-dinilai-tak-berdasar?page=all>
- Hilman, R. (2022, 21 Juni). Rig Pengeboran, Alat Bantu dalam Pengambilan Minyak Bumi. Diakses melalui <https://solarindustri.com/blog/rig-pengeboran/>
- ICJ. (2009, 3 Februari). Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). diakses 25 Januari 2022 melalui <https://www.icj-cij.org/en/case/132>
- IILSS. (2021, 16 April). Legal Definition of an Enclosed or Semi Enclosed Sea. Diakses 16 Desember 2022 melalui <http://iilss.net/legal-definition-of-an-enclosed-or-semi-enclosed-sea/>
- IILSS. (2021, 21 April). What is the Meaning of "Fringing Reef" in the Law of the Sea, LOSC and Customary International Law. Diakses 17 Desember 2022 melalui

- <http://iilss.net/what-is-the-meaning-of-fringing-reef-in-law-of-the-sea-losc-and-customary-international-law/>
- JMOL. (2022, 24 April). Laut Semi Tertutup dalam UNCLOS 1982. diakses 16 Desember 2022 melalui <https://jurnalmaritim.com/laut-semi-tertutup-dalam-unclos-1982/#:~:text=Di%20dunia%2C%20beberapa%20contoh%20LT,Indonesia%20merupakan%20'anggota'%20nya>
- Kementrian ESDM. (2014, 14 April). Lebih Jauh tentang Rig Migas. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Rig-Migas>
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2013, 28 Februari). Laut China Selatan. Diakses 8 Desember 2022 melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan
- Khaliq, R.U. (2021, 25 Februari). '3 Reasons' China Tries to Control South China Sea. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/3-reasons-china-tries-to-control-south-china-sea/2157110>
- M-30. (2020, 9 Januari). *Kenali UNCLOS*, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c>
- Media Reports. (2022, 25 Januari). Threats to Indonesia sovereign rights in EEZ. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/01/25/threats-to-indonesias-sovereign-rights-in-eez/>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2016, 13 Juli). China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea. Diakses 2 Desember 2022 melalui https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201607/t20160713_679474.html
- Mohan, R. (2022, 17 Oktober). What Asia Gets from Biden's New National Security Strategy. diakses 4 Desember 2022 melalui <https://foreignpolicy.com/2022/10/17/national-security-strategy-biden-asia-china-geopolitics-democracy/>
- Netherlands Ministry of Defence. (2022). Maritime Limits and Boundaries. diakses 16 Desember 2022 melalui <https://english.defensie.nl/topics/hydrography/maritime-limits-and-boundaries>
- Pletcher, K. Spratly Islands. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.britannica.com/place/Spratly-Islands>
- Pristiandaru, D.L. (2021, 3 Desember) China Senggol Natuna, Berapa Cadangan Migasnya?. Diakses melalui [https://www.kompas.com/global/read/2021/12/03/180551170/china-senggol-natuna-berapa-cadangan-migasnya?page=all#:~:text=Cadangan%20minyak%20bumi%20terbukti%20di,stock%20tank%20barrel%20\(MMSTB\).&text=Sementara%20itu%2C%20cadangan%20potensial%20minyak,cadangan%20mungkin%2048%2C23%20MMSTB](https://www.kompas.com/global/read/2021/12/03/180551170/china-senggol-natuna-berapa-cadangan-migasnya?page=all#:~:text=Cadangan%20minyak%20bumi%20terbukti%20di,stock%20tank%20barrel%20(MMSTB).&text=Sementara%20itu%2C%20cadangan%20potensial%20minyak,cadangan%20mungkin%2048%2C23%20MMSTB)
- Pompeo, M. (2020, 13 Juli). U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea. Diakses 4 Desember 2022 melalui <https://2017-2021.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/index.html#:~:text=In%20the%20South%20China%20Sea%2C%20we%20seek%20to%20preserve%20peace,or%20force%20to%20settle%20disputes.>

- Radio Free Asia. (2021, 5 Oktober). Chinese Survey Ship Reenters Indonesian Waters After Week of Retreat, diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.rfa.org/english/news/china/ship-10052021151118.html>
- Rutzick, J., Chen, J. (2021). The Validity of the 9 Dash Line. Diakses 27 November 2022 melalui <https://storymaps.arcgis.com/stories/4791710315c54e6fb963e10496faa4db>
- Shivangisaxena. Continental Shelf under the UN Convention on The Law of The Sea, 1982 UNCLOS. Diakses 24 Januari 2023 melalui <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1158-continental-shelf-under-the-u-n-convention-on-the-law-of-sea-1982-unclos.html>
- Strangjo, S. (2022, 12 Juli). Phillipine Foreign Secretary Hails South China Sea Ruling the 6th Anniversary. Diakses 4 Desember 2022 melalui <https://thediplomat.com/2022/07/philippine-foreign-secretary-hails-south-china-sea-ruling-on-6th-anniversary/>
- Wiyoga, P. (2021, 4 Oktober). Dikawal Penjaga Pantai China, Kapal Survei Hai Yang Dizhi 10 Kembali ke Natuna Utara. Diakses 2 Desember 2022 melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/04/dikawal-penjaga-pantai-china-kapal-survei-haiyang-dizhi-10-kembali-ke-natuna-utara>
- Vietnam., China. VN-China Basic Principles on Settlement of Sea Issues. (2022, 12 Oktober). Diakses 4 Desember 2022 melalui <https://en.vietnamplus.vn/vnchina-basic-principles-on-settlement-of-sea-issues/31776.vnp>